

# SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN



## Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2013

**Makassar, Jumat (11 Juli 2014)** . Memenuhi Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Soppeng bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, pada hari ini (11/7). Pada kesempatan ini hadir pula pejabat pelaksana BPK dan jajaran Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Dalam LHP yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan, **Tri Heriadi**, kepada Ketua DPRD dan Bupati Kabupaten Soppeng, **BPK RI menyatakan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2013**. LKPD Kabupaten Soppeng TA 2013 ini mengalami peningkatan opini dibandingkan tahun sebelumnya yang oleh BPK diberikan opini ~~%Tidak Memberikan Pendapat+~~ atau ~~%Disclaimer+~~. Namun demikian, untuk LKPD TA 2013 tetap masih dijumpai kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundangan yang berlaku di bidang keuangan negara

BPK memberikan opini WDP yang berarti bahwa LKPD yang disusun Pemerintah Kabupaten Soppeng telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, kecuali beberapa permasalahan yang diantaranya :

1. Aset tetap per 31 Desember 2013 yang disajikan Rp1,3 Trilyun diantaranya pada aset tetap tanah sebesar Rp78,75 Milyar masih selisih dengan nilai appraisal sebesar Rp15,29 Milyar dan Rp18,02 Milyar tidak mempunyai nilai luasan tanahnya, 21 bidang senilai Rp1,50 Milyar tidak diketahui tahun perolehannya, serta 18 bidang tidak diketahui nilai perolehannya;
2. Pada aset tetap peralatan dan mesin diantaranya terdapat 313 unit kendaraan yang kepemilikannya tidak didukung BPKB senilai Rp7,85 Milyar;
3. Pada aset tetap bangunan dan gedung Rp260,52 Milyar diantaranya masih selisih dengan nilai appraisal sebesar Rp35,57, terdapat gedung dan bangunan sebanyak 309 unit senilai Rp24,63 Milyar tidak diketahui tahun perolehannya, serta terdapat 470 unit gedung dan bangunan yang tidak diketahui nilai perolehannya; dan
4. Selain itu, saldo aset tetap per 31 Desember 2013 masih belum menyajikan saldo dengan nilai penyusutannya.

Dalam sambutannya, Tri Heriadi mengharapkan Kepala Daerah beserta jajarannya, untuk lebih meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah guna mewujudkan aparatur yang bersih, tertib dan berwibawa yang mengantarkan kepada masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

*Publikasi:*

**Sub Bagian Hukum dan Humas**

Jalan A.P. Pettarani, Makassar

Website: [makassar.bpk.go.id](http://makassar.bpk.go.id) / e-mail: [hukmas.sulsel@gmail.com](mailto:hukmas.sulsel@gmail.com)